BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri atas:
    a. Sekretariat, terdiri atas :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    b. Bidang Transmigrasi;
    c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    d. Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial;
    e. Unit Pelaksana Teknis; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 4

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
   b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
   c. penataan organisasi dan tatalaksana;
   d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
b. membuat daftar usulan kegiatan;
c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
l. mengevaluasi hasil program kerja;
m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
n. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
o. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Transmigrasi

Pasal 8

(1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang transmigrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan tugas dibidang ketransmigrasian;
    b. pelaksanaan identifikasi dan analisis keserasian pendukung dengan daya dukung alam dan lingkungan;
    c. pelaksanaan perumusan bahan komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian;
    d. pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk;
    e. pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis penyuluhan pendaftaran dan seleksi;
    f. pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan transmigrasi;

g. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan pengendalian penduduk; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 9

(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
   b. penyusunan petunjuk teknis lingkup lembaga latihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
   c. pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
   d. pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
   e. penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   f. penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   g. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   h. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian pelenggaraan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   i. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial

Pasal 10

(1) Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial;
   b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
   c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial;
   d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
(6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati, dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
(7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 15

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 69); dan
b. Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 129);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 116

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 116 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

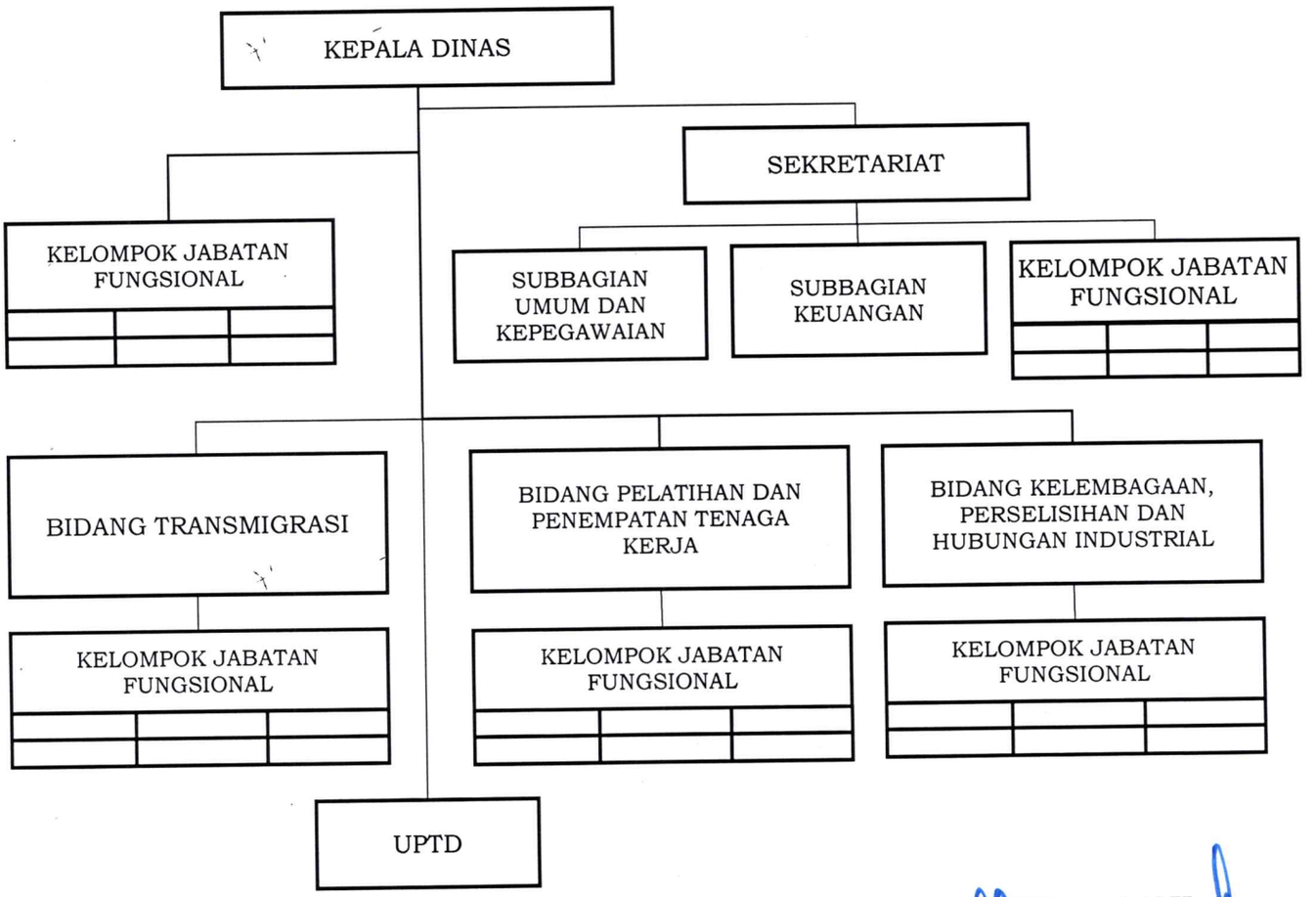

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 116 Tahun 2021
Tanggal : 20 Desember 2021

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

A. SEKRETARIAT

Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG TRANSMIGRASI

1. Subkoordinator Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman, menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyiapan dan pengarahan;
   b. pengolahan data penyiapan dan pengarahan;
   c. pelaksanaan operasional sosialisasi dan advokasi keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan;
   d. pelaksanaan operasional inventarisasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan;
   e. pelaksanaan operasional penetapan sasaran prioritas pengarahan dan penataan pesebaran penduduk;
   f. pelaksanaan operasional pengembangan partisipasi masyarakat dalam ketransmigrasian;
   g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar daerah dalam penataan pesebaran penduduk; dan
   h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman.

2. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi;
   b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan;
   c. pengolahan data pemindahan dan pembinaan;
   d. pelaksanaan operasional pelayanan perpindahan penduduk;
   e. pelaksanaan operasional koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan akomodasi perpindahan penduduk;
   f. pelaksanaan operasional pengawalan dan pelayanan penampungan transmigrasi;
   g. pelaksanaan operasional kerjasama pembinaan ketrampilan berusaha calon transmigrasi;
   h. pelaksanaan operasional adminitratif perpindahan penduduk; dan

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

C. BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Subkoordinator Pelatihan Standarisasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi :
   a. pengumpulan dan analisis data lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja;
   c. pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja yang meliputi inventarisasi lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja, pembinaan peningkatan produktivitas kerja dan fasilitas pemangan kerja didalam negeri dan luar negeri;
   d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja;
   f. pengumpulan dan analisis data lingkup standarisasi, produktivitas dan kompetensi kerja;
   g. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup standarisasi, produktifitas dan kompetensi kerja;
   h. pelaksanaan lingkup standarisasi, produktifitas dan kompetensi kerja yang meliputi inventarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan fasilitasi standarisasi, produktifitas dan kompetensi kerja;
   i. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan standarisasi, produktifitas dan kompetensi kerja; dan
   j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pelatihan Standarisasi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, menyelenggarakan fungsi:
   a. pengumpulan dan analisis data lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
   c. penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja/bursa kerja, fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja, pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) kabupaten siak, serta fasilitasi pendirian lembaga bursa kerja;
   d. penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) kabupaten siak dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan paspor TKI asal kota;
   e. penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi ketenagakerjaan;
   f. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi ketenagakerjaan;
   g. monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penempatan tenaga kerja dan infomasi pasar kerja;
   h. pengumpulan dan analisis data lingkup informasi pasar kerja dan perluasan kerja;
   i. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup informasi pasar kerja dan perluasan kerja;
   j. penyusunan bahan koordinasi dan supervise pengembangan perluasan kerja;

k. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perluasan kerja;
l. pengawasan dan pengendalian pengelolaan perluasan kerja;
m. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi pasar kerja dan perluasan kerja; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja.

D. BIDANG KELEMBAGAAN, PERSELISIHAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Subkoordinator Perselisihan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program kerja terkait perselisihan hubungan industrial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. penyusunan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan hubungan industrial;
   c. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan hubungan industrial;
   d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hubungan industrial; dan
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Subkoordinator Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja, menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program kerja terkait Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. penyusunan bahan koordinasi dan supervisi kelembagaan hubungan industrial;
   c. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan kelembagaan hubungan industrial;
   d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan hubungan industrial;
   e. penyusunan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja;
   f. penyusunan bahan koordinasi dan supervisi kesejahteraan pekerja;
   g. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan kesejahteraan pekerja;
   h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesejahteraan pekerja
   i. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan syarat-syarat kerja;
   j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian syarat-syarat kerja; dan
   k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI